

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pemprov Tak Maksimal

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta tak maksimal dalam mengoprasikan sistem pajak online. Kendati telah 10 tahun dicanangkan tetap tak mendongkrak pendapatan ibu kota. DPRD DKI Jakarta menduga, karena kurang efektif para pengusaha akhirnya hanya melaporkan separuh dari jumlah pajak yang wajib dibayarkan.

Anggota DPRD DKI Jakarta Jupiter mengatakan, sistem pajak online seharusnya dapat beroperasi maksimal. Oleh sebab itu, Pemrov DKI Jakarta jangan mencanangkan saja, akan tetapi mengkosok dan menjemput bola dalam menggali potensi daerah ■

“Percuma saja pencaangan sudah 10 tahun, tetapi paratur yang berwenang tidak maksimal dalam mengoprasikan sistem pajak online tersebut,” ungkap dia kepada INDOPOS di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

Politisi Partai Nasdem itu menduga, karena tak maksimal, selama ini hiburan malam ataupun para pengusaha di ibu kota hanya menyumbangkan sekitar 50 persen dari pengeluaran yang sebenarnya untuk pajak DKI. Kondisi ini akan sangat merugikan mengingat banyak

warga DKI yang menaruh uangnya ke usaha tersebut.

“Biasanya mereka hanya melaporkan kisaran 50 persen. Masyarakat bisa dirugikan jika sudah membayar pajak itu tapi tidak disetorkan ke Dispenda, yang ada hanya menambah keuntungan pemilik usaha,” ujar Jupiter.

Dengan begitu ia mendorong agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa lebih pro aktif dalam mengoprasikan sistem penghitungan pajak. Langkah ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan pajak.

Ketua Fraksi PAN DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengatakan,

pihaknya meminta Gubernur, Anies Baswedan untuk menaikkan pajak hiburan. “Kita akan mendorong pemerintah DKI Jakarta untuk menaikkan pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen. Ini sangat penting guna meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah, Red) DKI Jakarta,” ucapnya kepada INDOPOS di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

Menurut Hakim, APBD DKI Jakarta 2019 menargetkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp8,8 triliun, pajak BBN-KB Rp5,4 triliun, pajak hotel Rp 1,8 triliun,

restoran Rp 3,55 triliun, pajak hiburan Rp 900 miliar, dan pajak reklame Rp 1,05 triliun. Dilihat dari target tersebut, target pajak hiburan lebih rendah dari pajak kendaraan bermotor, BBN-KB, hotel, restoran, maupun reklame.

Padahal, bagi Hakim, pajak hiburan memiliki potensi karena sedang berkembang pesat. “Kalau sektor hiburan ini bisa dikelola dengan baik maka akan sangat membantu sekali dalam meningkatkan PAD DKI Jakarta,” tandas dia.

Namun, Hakim mengingat-

kan, Pemprov DKI Jakarta untuk mengawasi pembayaran pajak.

Baginya, masih banyak wajib pajak yang tak taat aturan. “Ke depan, hal ini tidak boleh terjadi lagi. Semua wajib pajak harus taat dan menjalankan kewajibannya dengan baik,” imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DKI Jakarta Basri Baco menyatakan, menolak bila pajak hiburan malam dinaikkan. Sebab, ada kemungkinan investor akan pindah karena pajak terlalu tinggi. Hal itu merugikan Jakarta. “Iya lah (pasti kabur-red). Ada waktu lain untuk Jakarta menaikkan pajak hiburannya. Tapi, saat ini bukanlah waktu yang tepat,” tukas dia. (aen)